



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan pembangunan merupakan agenda utama pembangunan yang harus diprioritaskan untuk dituntaskan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir untuk periode tahun 2008 – tahun 2013 di Kabupaten Pulang Pisau serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan pembangunan daerah jangka menengah di Kabupaten Pulang Pisau seperti berikut ini:

4.1.1 Masalah Infrastruktur Wilayah

- 1) Tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata di tiap kecamatan
- 2) Kualitas jalan dan jembatan yang masih rendah
- 3) Jaringan irigasi yang masih sedikit
- 4) Akses air bersih yang masih kecil

4.1.2 Masalah Kesehatan

- 1) Belum optimalnya Derajat Kesehatan Masyarakat dalam mempercepat pencapaian target MDG's
- 2) Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- 3) Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah.
- 4) Belum Terpenuhinya secara menyeluruh Sarana Fisik dan Sarana Peralatan Kesehatan lainnya di Tingkat Puskesmas Maupun Jejaringnya

4.1.3 Masalah Pendidikan

- 1) Rendahnya angka rata-rata lama sekolah
- 2) Rendahnya angka rasio sekolah terhadap murid untuk tingkat pendidikan menengah atas
- 3) Rendahnya angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan menengah atas
- 4) Rendahnya angka partisipasi murni untuk tingkat pendidikan menengah atas

4.1.4 Masalah Ekonomi Kerakyatan

- 1) Rendahnya jumlah koperasi aktif
- 2) Sistem manajemen usaha koperasi dan UMKM yang perlu ditingkatkan
- 3) Sistem kelembagaan koperasi dan UMKM yang perlu ditingkatkan;
- 4) SDM pengelola koperasi dan UMKM yang masih rendah;
- 5) Akses untuk pemodalannya bagi koperasi dan UMKM yang masih rendah

4.1.5 Masalah Pertanian dan Peternakan

- 1) Produktivitas hasil tanaman pangan yang masih rendah.
- 2) Menurunnya populasi ternak sapi
- 3) Rendahnya adopsi dan inovasi teknologi pertanian
- 4) Masih rendahnya keterampilan/keahlian petani dan petugas
- 5) Belum optimal pemberdayaan kelembagaan petani
- 6) Keterbatasan Infrastruktur sarana dan prasarana Peternakan
- 7) Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian produktif/potensial peruntukan lain
- 8) Lemahnya permodalan petani.
- 9) Belum ada komoditas unggulan daerah di bidang peternakan.

4.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap **visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota sekitar** agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Sumber lain bagi informasi atau isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1. Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Agenda Pembangunan Internasional

Dari uraian di atas maka akan dikaji terlebih dahulu mengenai kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, kajian agenda pembangunan internasional, dan kajian pembangunan daerah kabupaten/kota sekitar.

4.2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Di dalam RPJMN ditetapkan Visi Indonesia 2014, yaitu

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN

Kemudian visi dan misi diturunkan ke level operasional dengan cara menetapkan 11 prioritas nasional supaya lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Mayoritas sumber daya akan dialokasikan untuk mengerjakan 11 prioritas nasional yang terdiri dari:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
11. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

Pada setiap program, terdapat substansi inti yang berisi aspek-aspek pada sebuah program yang dilengkapi dengan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Kabupaten Pulang Pisau, sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia 2014.

4.2.2. Kebijakan Internasional

4.2.2.1. *Millenium Development Goals (MDG's)*

Kajian agenda pembangunan internasional dunia adalah tentang *Millenium Development Goals (MDG's)*. Indonesia telah berkomitmen terhadap pencapaian MDG's. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan bagi seluruh daerah di Indonesia, termasuk kabupaten Pulang Pisau, untuk menggunakan target yang dicanangkan dalam MDGs sebagai referensi dalam penetapan target pembangunan daerah masing-masing.

Tujuan pembangunan milenium (MDG's) terdiri dari:

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Memperbaiki kesehatan maternal;

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Isu-isu MDGs di atas juga dapat dijadikan sebagai isu strategis RPJMD Kabupaten Pulang Pisau periode 2013 - 2018, apabila telah dilakukan kajian mengenai relevansi isu MDG dengan permasalahan riil yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

4.2.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk menjaga sinergitas pembangunan secara berjenjang dari pembangunan nasional hingga tingkat daerah maka perlu dipahami kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, khusus untuk periode pembangunan jangka panjang. Dalam sub bab ini akan dibahas tentang Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah.

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 yang telah disepakati adalah:

KALIMANTAN TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL

Adapun misi pembangunan daerah Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah
2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang

berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah

11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2.3.2. Rencana Pembangunan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah

Visi pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu "

**MENERUSKAN DAN MENUNTASKAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN
TENGAH AGAR RAKYAT LEBIH SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DEMI
KEJAYAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)**

Pengertian tentang **masyarakat sejahtera** adalah:

1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun dan meratanya hasil-hasil pembangunan keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan sarana prasarana penunjang.
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup.

Sedangkan, pengertian tentang **masyarakat bermartabat** adalah terciptanya masyarakat yang memiliki nilai martabat yang tinggi dengan

tetap menjunjung budaya bangsa dan didasarkan kepada semangat HUMA BETANG dan BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Perwujudan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

1. Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.
2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat.
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah.

Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam masa lima tahun ke depan, maka ditetapkan **tujuan pembangunan** dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut.

1. Revitalisasi dan terciptanya *cluster-cluster* ekonomi unggulan di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota
2. Terselenggaranya penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya wilayah

3. Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
4. Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah.
5. Meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau.
6. Tersedianya akses infrastruktur Kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah.
7. Terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.
8. Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.
9. Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.
10. Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.
11. Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.
12. Meningkatnya daya saing masyarakat.
13. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah.
14. Terwujudnya soliditas antarkelompok masyarakat

Adapun permasalahan yang terdapat di RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Masalah penyediaan infrastruktur pembangunan
2. Masalah pengembangan ekonomi lokal
3. Masalah kualitas dan keterjangkauan pendidikan
4. Masalah bidang kesejahteraan sosial
5. Masalah pengembangan kapasitas birokrasi
6. Masalah pengelolaan sumber daya alam

4.2.3.3. Program Inisiatif Provinsi Kalimantan Tengah

Selain menelaah visi dan misi RPJMD Kalimantan Tengah, terdapat beberapa program pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lainnya, sebagai berikut:

a) *Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)*

Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (program membangun dan menjaga desa) yang dilaksanakan secara bersama-sama, baik pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu dimulai sejak tahun 2008. Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu bertujuan untuk mewujudkan desa/kelurahan percontohan yang mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu memacu pertumbuhan desa/kelurahan sekitarnya. Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu telah berhasil mengangkat sebanyak 210 desa/kelurahan.

b) *Kalteng Harati*

Program Kalteng Harati atau Kalteng Pintar yang dimulai pada 2 Mei 2010 bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Program Kalteng Harati mengedepankan lima prioritas, yakni kesejahteraan guru, pendidikan dan pelatihan guru, beasiswa untuk siswa berprestasi, penyediaan dan pendistribusian buku-buku pelajaran, meningkatkan kualitas mutu belajar mengajar.

c) *Kalteng Barigas*

Program Kalteng Barigas (Kalteng Sehat) diluncurkan pada tahun 2010. Program Kalteng Barigas ini untuk menjadikan masyarakat Kalteng yang sehat. Program Kalteng Barigas yang dimanifestasikan ke dalam program pembangunan kesehatan diartikan sebagai kondisi masyarakat Kalteng yang mempunyai kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat sehingga produktif secara sosial dan

ekonomis serta menjadi sumber daya yang kompetitif dalam menunjang kesinambungan pembangunan.

d) *Kalteng Besuh*

Program Kalteng Besuh (Kalteng Kenyang) diluncurkan pada bulan Juni 2013 di Kabupaten Gunung Mas. Program Kalteng Besuh merupakan program dalam bidang pertanian dan perikanan. Hasil yang diharapkan dari Program Kalteng Besuh adalah terwujudnya ketahanan pangan yang harus berdaulat pangan.

4.2.4. Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Di dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Kalimantan Tengah, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau akan meninjau kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang berada di sekitar Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut ini di tabel 4.1 akan ditampilkan kajian terhadap kebijakan pembangunan di kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Pulang Pisau:

Tabel 4.1
Kebijakan Daerah Lain

NO	NAMA DAERAH LAIN	PERIODE RPJMD	KEBIJAKAN TERKAIT	KETERANGAN
1	Kabupaten Kapuas	2013 - 2018	<p>Isu Strategis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Ekonomi Daerah • Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) • Pembangunan Infrastruktur • Permasalahan bidang Kesejahteraan Sosial <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan cakupan layanan, akses dan distribusi infrastruktur • Peningkatan cakupan layanan, akses dan distribusi rumah layak • Peningkatan cakupan layanan, akses dan distribusi infrastruktur • Peningkatan produktivitas hasil pertanian • Intensifikasi pertanian dan diversifikasi pangan • Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup • Harmonisasi dan deregulasi peraturan 	

NO	NAMA DAERAH LAIN	PERIODE RPJMD	KEBIJAKAN TERKAIT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pola kerjasama yang menyerap tenaga kerja lokal 	
2	Kabupaten Katingan	2013 - 2018		Masih dalam proses penyusunan
3	Kabupaten Gunung Mas	2013 - 2018		Masih dalam proses penyusunan
4	Kota Palangka Raya	2013 - 2018	.	Masih dalam proses penyusunan

4.2.5. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau 2006 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau memuat arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dengan berbasis pada agribisnis dan agro industri
3. Meningkatkan pembangunan prasarana transportasi dan pembangunan Pelabuhan yang terintegrasi dengan pembangunan Kereta Api di Kalimantan Tengah
4. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
5. Mendorong kehidupan masyarakat yang tertib, taat hukum, dinamis dan demokratis, menghargai nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal sebagai bagian dari budaya nasional.
6. Mewujudkan Tata Pemerintahan daerah yang baik dan bersih

Adapun sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau 2006 – 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dengan berbasis pada agribisnis dan agro industri.
3. Terbangunnya prasarana transportasi dan pelabuhan di Kabupaten Pulang Pisau yang terintegrasi dengan Kereta Api di Kalimantan Tengah
4. Berfungsinya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan

5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, taat hukum, dinamis dan demokratis, menghargai nilai-nilai luhur agama dan budaya lokal sebagai bagian dari budaya nasional
6. Terwujudnya tata Pemerintahan yang baik dan bersih

4.2.6. Penetapan Isu Strategis

Isu-isu strategis di Kabupaten Pulang Pisau untuk periode tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan secara bersama yang terdiri dari:

1. **Peningkatan aksesibilitas daerah, irigasi teknis, air bersih dan kelistrikan**

Kabupaten Pulang Pisau sebagai daerah yang baru berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Saat ini, kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 kecamatan, dan 99 desa. Dengan kondisi geografi yang sangat luas dan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti: jalan, air, listrik yang masih sangat terbatas. Infrastruktur dasar tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah akan membuat perekonomian semakin maju.

Adapun irigasi teknis sangat diperlukan karena penduduk Kabupaten Pulang Pisau mayoritas bekerja di bidang pertanian. Keberadaan irigasi teknis akan sangat membantu mayoritas penduduk Kabupaten Pulang Pisau yang bekerja di sektor pertanian di dalam meningkatkan hasil pertanian.

2. **Pengembangan sektor dan komoditas unggulan daerah.**

Kabupaten Pulang Pisau mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perburuan, dan peternakan. Untuk bidang pertanian, jenis tanaman yang ditanam secara mayoritas adalah: padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Untuk bidang peternakan, jenis hewan yang dikembangbiakkan secara mayoritas adalah: sapi, babi, dan

unggas. Untuk perkebunan, jenis tanaman yang ditanam secara mayoritas adalah: karet, dan kelapa swait.

Untuk mendapatkan nilai lebih dari bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan perlu dilakukan usaha agar produktivitas dari tanaman maupun peternakan yang sedang dikembangkan menjadi lebih produktif lagi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah penelitian mengenai komoditas yang bisa dijadikan unggulan daerah sehingga menghasilkan nilai lebih bagi masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan tersebut.

3. Peningkatan akses dan layanan pendidikan masyarakat.

Berdasarkan data perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan bahwa Kabupaten Pulang Pisau memiliki IPM yang paling rendah. Di dalam variabel IPM terdapat angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Untuk kedua variable tersebut, Kabupaten Pulang Pisau menempati posisi paling bawah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Usaha untuk meningkatkan IPM melalui salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan akses pendidikan. Peningkatan akses dan layanan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf di Kabupaten Pulang Pisau.

Peningkatan akses dan layanan pendidikan diharapkan lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.

4. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Untuk bidang kesehatan, kekurangan dokter menjadi permasalahan yang harus bisa ditangani. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau harus bisa mencari solusi alternatif agar para dokter mau bekerja di Kabupaten Pulang Pisau. Apabila kekurangan dokter tidak bisa ditangani maka

masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau tidak bisa tertangani dengan baik apabila berada dalam kondisi sakit.

Untuk sarana fisik dan sarana peralatan kesehatan lainnya di tingkat puskesmas maupun jejaringnya perlu lebih ditingkatkan kualitasnya. Dengan peningkatan kualitas diharapkan puskesmas dan jejaringnya dapat membuat masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau lebih sehat dan dapat hidup lebih panjang sehingga angka harapan hidup di Kabupaten Pulang Pisau tidak menjadi yang terendah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM dan koperasi

Salah satu cara meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau adalah pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Keberhasilan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat membuat masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau harus dapat mengambil manfaat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Di mana usaha mikro, kecil, dan menengah dapat diberdayakan melalui upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Keberhasilan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah akan terangkat secara ekonomi dan akan membuat masyarakat sejahtera.

Adapun untuk Koperasi, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat mengambil manfaat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Di dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah

dapat memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi dalam bentuk antara lain: memperkuat permodalan dan pembiayaan Koperasi, bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan badan usaha lain. Dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau diharapkan Koperasi dapat berkembang dan akan membuat para anggota